

**PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI: STUDI
EKSPERIMEN PADA KONTEKS PEMERINTAHAN DAERAH**

Novita Puspasari

Alumni Universitas Gadjah Mada

Eko Suwardi

Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Moralitas individu dan pengendalian internal dihipotesiskan saling berinteraksi dalam mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Individu yang memiliki level moral tinggi dihipotesiskan tidak akan melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi ada dan tidak ada elemen pengendalian internal. Individu yang memiliki level moral rendah dihipotesiskan akan melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal. Untuk menguji hal tersebut dilakukan eksperimen faktorial 2x2 dengan melibatkan 57 mahasiswa pascasarjana Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara moralitas individu dan pengendalian internal. Kondisi elemen pengendalian internal tidak mempengaruhi individu dengan level moral tinggi untuk cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Sedangkan individu dengan level moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal

Kata-kata kunci: Kecurangan Akuntansi, Moralitas, Pengendalian Internal, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Keuangan daerah tidak luput dari imbas sistem reformasi yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif keuangan khususnya institusi pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum seperti peraturan-peraturan mengenai daerah otonom, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi, dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistem organisasi dengan berbasiskan *good governance* kepada institusi pemerintah. Menurut Syakhroza (2003), *good governance* selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek dan nilai-nilai masyarakat. Salah satu pilar utama sistem *good governance* adalah akuntabilitas. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia paska reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan yang melaporkan aktivitas pengelolaan keuangan di institusi pemerintah.

Desentralisasi pengelolaan keuangan negara turut menggeser ruang korupsi ke level daerah. Hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada semester II periode 1 Juli sampai 31 Desember 2010 menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi mencapai 272 kasus. Sektor dengan jumlah kasus terbesar adalah sektor infrastruktur berjumlah 53 kasus. Dalam *Trend Corruption Report* (TCR) yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), sektor yang paling sering menjadi lahan korupsi ditempati pengadaan barang dan jasa yang ditemukan dalam 33 kasus, di bawah sektor pengadaan barang dan jasa adalah sektor kesejahteraan sosial. Dalam laporan Pukat UGM, tingkat kerugian negara terbanyak pada triwulan III 2010 berkisar pada angka di bawah Rp1

miliar dengan 39 kasus. Penelitian lainnya adalah penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada semester pertama tahun 2010, BPS mencatat bahwa korupsi pada sektor keuangan daerah berada di peringkat paling atas dengan 38%, di atas sektor infrastruktur, pendidikan, pertanahan, kesehatan dan lainnya. Secara faktual, Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi yang tinggi di dunia, yaitu peringkat 100 dari 183 terkorup dengan indeks korupsi 3,0 (*Transparency International*, 2011). Hasil penelitian Sheifer dan Vishny (1993) serta Gaviria (2001) dalam Wilopo (2006) menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi suatu negara.

Salah satu data yang mengindikasikan terjadinya kecurangan akuntansi di laporan keuangan misalnya adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, dari 466 pemerintah daerah baru sekitar 32 pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang belum baik. Jika kualitas pelaporan tidak baik, maka pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya ekonomi daerah juga patut dipertanyakan. Hasil pemeriksaan BPK lainnya pada 2010 adalah pada pengelolaan/managemen aset pada sembilan objek pemeriksaan menunjukkan adanya 91 kasus ketidakpatuhan senilai Rp34,31miliar. Data mengenai kecurangan akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi sudah demikian mengkhawatirkan karena telah merugikan negara dalam jumlah besar.

Menurut Wells (2007), kecurangan akuntansi (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tujuan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu. Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan korupsi.

Pada tahun 1970an, Cressey, seorang kriminolog dan sosiolog asal Amerika Serikat, menyatakan ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan akuntansi, yaitu: kesempatan, rasionalisasi, dan dorongan/tekanan. Ketiga faktor tersebut disebut *fraud triangle* (segitiga kecurangan akuntansi). Pada tahun 1980an, Albrecht, seorang doktor akuntansi, mencetuskan *fraud scale* yang berisi tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*, yaitu tekanan situasional (*situational pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud* dan integritas personal. Studi dari Albrecht ini memperkuat studi Cressey sebelumnya. Albrecht mengganti faktor *rationalization* dengan *personal integrity* agar lebih dapat diobservasi. *Personal integrity* mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki individu. *Personal integrity* dapat diobservasi lewat teori perkembangan moral seperti dalam penelitian-penelitian etika.

Ramamoorti (2008) menyatakan bahwa rasionalisasi dan tekanan adalah faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi yang didasari oleh kondisi psikologis pelaku. Dorminey (2011) menyatakan bahwa faktor rasionalisasi dan tekanan merupakan karakteristik pelaku kecurangan akuntansi yang tidak dapat diobservasi karena mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh pelaku ketika akan melakukan kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal. Menurut Baucus (1994) dalam Hernandez dan Groot (2007), secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis, oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral. Penelitian dari Hernandez dan Groot (2007) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Albrecht (2004) menyatakan bahwa

faktor integritas personal dalam *fraud scale* mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu.

Beberapa penelitian di bidang etika menggunakan teori perkembangan moral untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu tindakan. Salah satu yang sering digunakan adalah teori mengenai level penalaran moral Kohlberg. Mengetahui level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, berdasarkan level penalaran moralnya.

Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil penelitian Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Bernardi (1994) dan Ponemon (1993) dalam Moroney (2008) menemukan bahwa semakin tinggi level moral individu akan semakin sensitif terhadap isu etika.

Selain faktor rasionalisasi yang berkaitan erat dengan etika, faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi adalah faktor kesempatan. Salah satu penyebab adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan akuntansi adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya pengendalian internal organisasi. Coram *et al.* (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi internal audit akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan *et al.* (2008) menemukan bahwa auditor berperan dalam mengurangi faktor kesempatan (*opportunity*) dalam kecurangan akuntansi.

Penelitian ini akan mengkolaborasikan teori mengenai kecurangan akuntansi dan etika dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Level moral individu (tinggi dan rendah) dan elemen pengendalian internal organisasi (ada dan tidak ada) merupakan faktor yang akan diteliti sebagai penyebab terjadinya kecurangan akuntansi dalam penelitian ini.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kecurangan akuntansi (*fraud*)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan kecurangan akuntansi mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara pegawai atau pihak ketiga.

Dalam *fraud triangle*, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi yaitu: rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*pressure*) dan kesempatan (*opportunity*). Dalam *fraud scale* ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi yaitu tekanan situasional (*situasional pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud*, dan cara individu merasionalkan sesuatu yang disebut integritas personal (*personal integrity*). Albrecht mengganti faktor *rationalization* dengan *personal integrity* agar lebih

dapat diobservasi, dengan mengobservasi keputusan individu dan proses pembuatan keputusan individu, akan lebih mendekati tujuan mengetahui pembuatan keputusan secara etis. Menurut Albrecht (2004), pelanggaran terhadap etika, kejujuran dan tanggung jawab merupakan inti dari tindakan kecurangan akuntansi. Permasalahan etika disebabkan oleh rasionalisasi, dan dengan beberapa perluasan, faktor tekanan (*pressure*) akan terkait dengan fraud dengan melihat kondisi individu yang melakukan *fraud* saat mempertimbangkan tindakannya benar/salah.

Penalaran Moral

Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Kohlberg (1969) sebagaimana dikutip oleh McPhail (2002) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-konvensional*. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachchi menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Menurut Rest dan Narvaez (1994) dalam Liyanarachchi (2009), semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan ‘hal yang benar’.

Dalam tahapan yang paling rendah (*pre-conventional*), individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada. Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua (*conventional*), individu akan mendasarkan tindakannya persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi (*post-conventional*), individu mendasari tindakannya

dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal.

Menurut Welton (1994), dalam setiap *stage* Kohlberg, individu memiliki pandangan sendiri mengenai versi ‘hal yang benar’ menurutnya. Individu dalam *stage* 1 merasa bahwa hal yang benar adalah apa yang menjadi kepentingan individu tersebut. Individu dalam *stage* 2 menganggap bahwa hal yang benar adalah hasil dari pertukaran yang imbang, persetujuan maupun posisi tawar yang imbang. Individu dalam *stage* 3 merasa bahwa hal yang benar adalah terkait dengan pengharapan akan kepercayaan, loyalitas, dan respek dari teman-teman dan keluarganya. Individu dalam *stage* 4 menganggap bahwa hal yang benar adalah dengan membuat kontribusi untuk masyarakat, grup atau institusi. Individu dalam *stage* 5 dan *stage* 6 menganggap bahwa kebenaran adalah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etis, persamaan hak manusia dan harga diri sebagai seorang makhluk hidup.

Pengendalian Internal

Coram *et al.* (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan *et al.* (2008) membahas peranan auditor dalam mengurangi faktor kesempatan (*opportunity*) dalam kecurangan akuntansi. Menurut Bastian (2006), pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Menurut Arens dan Loebecke (1996) terdapat elemen pengendalian internal yang harus dimiliki oleh organisasi. Kelimanya antara lain: lingkungan pengendalian, penetapan risiko oleh manajemen, sistem komunikasi dan informasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Sedangkan menurut Mulyadi (1998) ada empat elemen pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional dengan tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup kepada harta, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab.

Boynton (2006) mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilakukan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko yang diambil untuk pencapaian tujuan organisasi.

Definisi sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu: sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instansi pemerintah daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan instansi pemerintahan Daerah kabupaten/kota merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hipotesis

American Institute of Certified Public Accountant (2009) menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas

terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Coram *et al.* (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi internal audit akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan *et al.* (2008) membahas peranan auditor dalam mengurangi faktor kesempatan (*opportunity*) dalam kecurangan akuntansi. Agar sistem pengendalian internal dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan elemen pengendalian internal. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menurut BPKP (2008) wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan menerapkan elemen-elemen pengendalian internal. Menurut Lovell (2008), peraturan yang ada dalam organisasi merupakan suatu bentuk pengendalian internal yang berfungsi sebagai alat untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.

Pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang akan diteliti sebagai penyebab kecurangan akuntansi dalam penelitian ini. Coram *et al.* (2008) menemukan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi dan melaporkannya sendiri. Hogan *et al.* (2008) menemukan bahwa auditor internal berperan penting dalam mengurangi faktor kesempatan dalam kecurangan akuntansi.

Faktor lain penyebab terjadinya kecurangan akuntansi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor etika yang berkaitan erat dengan moralitas individu. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachchi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral

rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum.

Penelitian ini juga berpendapat bahwa moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post-konvensional*), semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

Individu dengan level penalaran moral tinggi di dalam tindakannya akan memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya dan mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral, maka ada atau tidak adanya elemen pengendalian internal tidak akan membuatnya melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan organisasi dan masyarakat. Menurut Graham (1995) dan Patterson (2001) dalam Moroney (2008) individu dengan level penalaran moral tinggi dalam perbuatannya akan lebih berorientasi pada prinsip-prinsip moral yang universal.

Kondisi elemen pengendalian internal di dalam organisasi (ada dan tidak ada pengendalian internal) dapat mempengaruhi individu dengan level moral rendah untuk cenderung melakukan atau tidak melakukan kecurangan akuntansi. Namun bagi individu dengan level moral tinggi, kondisi ada dan tidak ada elemen pengendalian internal organisasi tidak akan membuatnya melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan organisasi dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis;

H1: Kondisi elemen pengendalian internal mempengaruhi hubungan antara level moral individu dengan kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi.

H2: Kondisi elemen pengendalian internal tidak mempengaruhi individu dengan level moral tinggi untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Dalam *fraud scale*, ketika tekanan situasional dan kesempatan untuk melakukan *fraud* tinggi namun integritas personal rendah maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan sangat tinggi. Kesempatan yang dimaksud disini adalah kondisi pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Menurut Albrecht (2004), salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam organisasi, individu dengan level penalaran moral rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), misalnya tindakan yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi. Kondisi tersebut sesuai dengan yang ada dalam tingkatan level *pre-conventional* Kohlberg yaitu individu yang memiliki level penalaran moral rendah memiliki motivasi utama untuk kepentingan pribadinya (sesuai dengan *stage 2* Kohlberg). Sementara itu, individu dengan level penalaran tinggi dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi tetap tidak akan melakukan kecurangan akuntansi yang tidak etis dan akan merugikan banyak pihak.

Dalam level moral Kohlberg, taat kepada peraturan yang ada karena menghindari sanksi tertentu termasuk dalam tahap yang rendah yaitu level *pre-conventional*. Individu dengan penalaran moral rendah dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi karena takut perbuatannya akan terdeteksi oleh pengendalian internal organisasi dan ia akan mendapat sanksi hukum. Hal ini sesuai dengan *stage 1* pada perkembangan moral model Kohlberg. Terdapat bukti empiris dari Graham (1995) dan Patterson (2001) dalam Moroney (2008) yang menemukan bahwa individu dengan level penalaran moral rendah lebih berorientasi pada peraturan dan sanksi

hukum yang mungkin didapatkan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis;

H3: Dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal, individu yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan dengan individu yang memiliki level penalaran moral tinggi.

H4: Individu dengan level penalaran moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal dibandingkan pada kondisi terdapat elemen pengendalian internal.

METODE

Prosedur dan Tugas Partisipan

Peneliti membuat rangkaian prosedur yang akan dikerjakan oleh partisipan agar eksperimen dapat berjalan sesuai dengan manipulasi yang direncanakan. Partisipan dibagikan amplop namun mereka tidak diperkenankan membuka amplop sampai semua amplop diterima semua partisipan. Setelah semua partisipan menerima amplop, amplop tersebut dibuka secara bersama-sama.

Di dalam amplop yang diterima peserta, terdapat dua buah penugasan. Penugasan pertama adalah penugasan mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi. Subjek diberikan skenario yang berisi informasi mengenai peran mereka di dalam eksperimen. Pada penelitian ini responden diberi skenario mengenai seorang manager di sektor pemerintahan (Kepala SKPD). Di dalam skenario, partisipan diberi pemahaman mengenai latar belakang seorang Kepala SKPD dan kondisi yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya. Skenario eksperimen dalam penugasan pertama ini menggunakan konteks orang ketiga (*third-person context*) seperti yang disarankan oleh Rest (1986) dalam Liyanarachi (2009) untuk penelitian-penelitian etika. Hal ini diperkuat dengan penelitian-penelitian etika yang dilakukan oleh

Arnold dan Ponemon (1991), dan Bernardi dan Guptill (2008) yang menggunakan konteks orang ketiga. Terdapat dua jenis kondisi di dalam skenario kecurangan akuntansi, yaitu kondisi ada dan tidak ada elemen pengendalian internal. Kondisi tersebut secara acak terdapat di dalam skenario yang dibagikan kepada subjek eksperimen. Di bagian akhir skenario, terdapat kasus kecurangan akuntansi. Kasus tersebut mengenai proyek tender yang ada di Dinas X. Setelah membaca skenario, subjek diminta untuk memberi penilaian berkaitan dengan pertanyaan kecurangan akuntansi dalam kasus tender tersebut.

Di akhir penugasan pertama, responden akan diminta menjawab pertanyaan untuk cek manipulasi. Setelah penugasan pertama usai, kertas yang berisi penugasan pertama dimasukkan kembali ke dalam amplop, partisipan kemudian diminta mengerjakan penugasan kedua. Pada penugasan kedua, subjek akan diminta untuk membaca empat buah skenario mengenai dilema etika dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk mengukur level penalaran moral mereka.

Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-2 Program Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) UGM. Alasan pemilihan sampel mahasiswa S-2 MEP UGM adalah karena menurut penelitian Betts (2009), pelaku *fraud* dengan jenjang pendidikan S-2 melakukan *fraud* dengan jumlah lebih besar dibandingkan dengan pelaku *fraud* dengan jenjang pendidikan S-1. Alasan kedua adalah mahasiswa S-2 MEP UGM mendapat porsi kuliah di bidang pemerintahan lebih banyak dibandingkan S-2 ekonomi lainnya sehingga diharapkan dapat mendekati karakteristik manajer sektor publik seperti dalam skenario eksperimen. Total sebanyak 70 mahasiswa yang berpartisipasi dalam eksperimen.

Desain Eksperimen

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen faktorial 2x2 untuk menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan akuntansi, sedangkan variabel independennya adalah moralitas individu (level moral tinggi dan rendah) dan pengendalian internal (ada dan tidak ada elemen pengendalian internal).

Peneliti mengamati kecenderungan individu melakukan kecurangan akuntansi dengan membagi partisipan ke dalam empat grup: (1) Grup 1: kelompok level moral tinggi dalam kondisi ada elemen pengendalian internal, (2) Grup 2: kelompok level moral tinggi dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal, (3) Grup 3: kelompok level moral rendah dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal, dan (4) Grup 4: kelompok level moral rendah dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal. Desain eksperimen dapat dilihat pada tabel 1.

===== TABEL 1 DISINI =====

Variabel dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut ACFE, ada tiga jenis kecurangan akuntansi, yaitu: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva, dan korupsi. Variabel kecurangan akuntansi diukur dengan meminta partisipan untuk memberikan pendapatnya dalam pertanyaan yang mewakili ketiga jenis kecurangan akuntansi. Partisipan menjawab pertanyaan tersebut setelah membaca skenario eksperimen. Skala Likert 1–7 digunakan untuk mengukur respons dari partisipan. Semakin tinggi partisipan memberikan angka penilaiannya, semakin cenderung ia berbuat curang.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah moralitas individu (level moral tinggi dan rendah) dan pengendalian internal (ada dan tidak ada elemen pengendalian internal). Pengukuran moralitas individu berasal dari model pengukuran moral yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) dan Rest (1979) dalam bentuk instrumen *Defining*

Issues Test (DIT). Instrumen ini berbentuk kasus dilema etika. Moralitas individu diukur melalui instrumen yang dikembangkan dari Rest (1979) untuk mengukur level penalaran moral individu melalui empat skenario dilema etika. Pembagian skor level penalaran moral (tinggi dan rendah) menggunakan nilai median *P-score* dari total sampel.

Pengukuran variabel pengendalian internal terdiri dari dua skema dalam skenario: ada elemen pengendalian internal dan tidak ada elemen pengendalian internal. Kondisi adanya elemen pengendalian internal digambarkan melalui adanya penerapan wewenang dan tanggung jawab di organisasi, pencatatan transaksi berkala, adanya pengendalian fisik, sistem akuntansi yang komprehensif, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Kondisi tidak adanya elemen pengendalian internal digambarkan dalam skenario berupa tidak adanya penerapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas di organisasi, pencatatan transaksi yang tidak berkala, tidak adanya pengendalian fisik, sistem akuntansi yang tidak dapat mencatat seluruh kegiatan operasional instansi serta tidak adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala di dalam instansi.

HASIL

Cek Manipulasi

Cek manipulasi dilakukan dengan menguji partisipan untuk menentukan benar atau salah dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai tugas partisipan selaku Kepala Dinas X. Pertanyaan kedua adalah mengenai gambaran elemen pengendalian internal di Dinas X. Hasil analisis cek manipulasi menunjukkan bahwa dari 70 partisipan, hanya sebanyak 57 partisipan (81,4%) yang lolos cek manipulasi dan lolos dari eliminasi penalaran moral, sehingga partisipan yang tidak lolos cek manipulasi dan tidak lolos eliminasi penalaran moral adalah sebanyak 13 orang (18,6%).

Hasil Eksperimen

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig* 0,411 (diatas 0,005), dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa data terdistribusi dengan normal sehingga memenuhi salah satu asumsi *analysis of variance* (ANOVA). *Tests of homogeneity of variance* dilakukan untuk mengetahui apakah keempat perlakuan (perlakuan 1,2,3, dan 4) mempunyai varian yang sama. Hasil uji statistik menunjukkan nilai *levene statistic* sebesar 0,176 (diatas 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok subjek memenuhi varian yang sama sehingga telah memenuhi asumsi ANOVA (Hair *et al*, 2006). Sedangkan untuk uji *Analysis of Variance-Between Groups* menunjukkan *p-value* signifikan pada 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antar grup. Untuk menjawab hipotesis, dibawah ini akan ditampilkan tabel pengaruh level moral individu dan elemen pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan deskripsi statistik untuk melihat perbedaan antar grup.

===== TABEL 2 DISINI =====

===== TABEL 3 DISINI =====

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kondisi elemen pengendalian internal akan mempengaruhi hubungan antara level moral individu dengan kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat interaksi antara level moral dengan elemen pengendalian internal ($F= 22.877$ dengan *p-value* 0,000). Bukti mengenai kekuatan pengaruh variabel interaksi tersebut menunjukkan bahwa ada saling ketergantungan antara level moral individu dengan kondisi elemen pengendalian internal, dengan demikian hipotesis pertama didukung.

Kondisi ada atau tidak ada pengendalian internal dalam sebuah organisasi akan membuat individu dengan level moral tertentu untuk cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Perubahan level kondisi elemen pengendalian internal (ada dan tidak ada elemen pengendalian internal akan mengakibatkan dampak perubahan pada individu dengan level moral tertentu (tinggi atau rendah) untuk melakukan kecurangan akuntansi. Tabel 3 menunjukkan perbedaan *mean* tiap grup dengan level moral tertentu dan kondisi elemen pengendalian internal tertentu. Untuk mengetahui perbedaan *mean* grup yang signifikan, maka dilakukan analisis *post-hoc*.

===== TABEL 4 DISINI =====

Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 *tukey t-statistics*, peneliti membandingkan antara *mean* Grup 1 dan 2 untuk melihat pengaruh kondisi elemen pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dari perbandingan kedua grup tersebut didapatkan *mean difference* sebesar 0,2667 dengan nilai $p=0,821$. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Grup 1 dan Grup 2. Hal ini berarti kondisi ada dan tidak ada elemen pengendalian internal tidak mempengaruhi individu yang memiliki level moral tinggi untuk melakukan kecurangan akuntansi, dengan demikian hipotesis kedua didukung.

Hasil penelitian ini membuktikan apa yang ada dalam hirarki tahap perkembangan moral Kohlberg. Semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post-konvensional*), semakin individu tersebut memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Semakin tinggi level moral individu, semakin ia berusaha untuk menghindari diri dari kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan banyak pihak.

Individu dengan level penalaran moral tinggi di dalam tindakannya akan memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya dan mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral, maka ada atau tidak adanya elemen pengendalian internal tidak akan

membuatnya melakukan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat hasil dari penelitian-penelitian etika yang sebelumnya dilakukan oleh Liyanarachi (2009), Arnold dan Ponemon (1991), Welton (1994), Graham (1995) dan Patterson (2001) dalam Maroney (2008) bahwa individu yang memiliki level penalaran moral tinggi akan lebih sensitif terhadap isu-isu etika, sehingga akan cenderung melakukan perbuatan yang etis.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal, individu yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan dengan individu yang memiliki level penalaran moral tinggi. Dari tabel 3 dan tabel 4, peneliti membandingkan antara Grup 4 dan Grup 2 yang merupakan representasi dari hipotesis. Dari hasil perbandingan *mean* kedua grup, didapatkan *mean difference* 2,3143 dengan nilai $p=0,000$. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Grup 4 dan Grup 2. Individu yang memiliki level penalaran moral rendah (Grup 4) lebih cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan individu yang memiliki level penalaran moral tinggi (Grup 2) dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal. Dengan demikian, hipotesis ketiga didukung.

Dalam keadaan tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam organisasi, individu dengan level penalaran moral rendah akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), misalnya melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam *stage 2* Kohlberg (*level pre-conventional*) yaitu individu yang memiliki level penalaran moral rendah memiliki motivasi utama untuk kepentingan pribadinya.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa individu dengan level penalaran moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal dibandingkan pada kondisi terdapat elemen pengendalian internal. Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 *tukey t-statistics*, peneliti membandingkan antara *mean* Grup 4 dan 3 dan

didapatkan *mean difference* sebesar 1,8681 dengan nilai $p=0,000$. *Mean* Grup 3 sebesar 0,89872 lebih rendah dibandingkan *mean* grup 4 yaitu sebesar 3,7857. Hal ini berarti individu dengan level penalaran moral rendah dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal (Grup 4) cenderung melakukan kecurangan akuntansi jika dibandingkan dengan individu dengan level penalaran moral rendah dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal (Grup 3), dengan demikian hipotesis keempat didukung.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Graham (1995) dan Patterson (2001) dalam Maroney (2008) yang menemukan bahwa individu dengan level penalaran rendah lebih berorientasi pada peraturan dan sanksi hukum yang mungkin diterimanya sehingga dalam kondisi ada elemen pengendalian internal ia tidak akan melakukan perbuatan yang akan menyebabkan dirinya diberi hukuman. Hasil penelitian ini turut mendukung penelitian dari Maroney (2006) yang menemukan bahwa peraturan dapat menjadi alat pencegah yang efektif agar seseorang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Lovell (2008), peraturan yang ada dalam organisasi merupakan suatu bentuk pengendalian internal yang berfungsi sebagai alat untuk memastikan tujuan organisasi tercapai

DISKUSI DAN KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki level penalaran moral rendah dan level penalaran moral tinggi dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal dan tidak terdapat elemen dan pengendalian internal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. Artinya perubahan pada satu level faktor level moral atau pada kondisi pengendalian internal, akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini dapat terlihat dari hipotesis pertama.

Hasil dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa individu yang memiliki level penalaran moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi baik dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal maupun dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi. Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada individu dengan level penalaran moral tinggi untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi, baik dalam kondisi ada maupun tidak ada elemen pengendalian internal di organisasi.

Elemen pengendalian internal dapat menjadi alat yang mampu mengurangi kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi bagi individu dengan level penalaran moral rendah. Hasil pengujian hipotesis ketiga dan keempat membuktikan bahwa dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal, individu yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal, individu dengan level penalaran moral rendah akan cenderung melakukan kecurangan akuntansi.

Ada dua implikasi penting dari penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel yang terkait demografis responden (gender, posisi di organisasi, pengalaman bekerja, usia, dan pendidikan) untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk lebih fokus pada desain eksperimen yang lebih sempurna agar lebih dapat menggambarkan kondisi yang lebih nyata.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya terkait semua informasi yang menggambarkan elemen pengendalian internal organisasi kemungkinan tidak tersedia di dalam skenario yang diberikan karena elemen pengendalian internal di sektor pemerintahan di dunia nyata lebih kompleks. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-2 Program Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada, harus

berhati-hati untuk menggeneralisir hasil penelitian ini untuk situasi lainnya karena hasilnya belum tentu sama pada partisipan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, S. W. dan C. Albrecht. 2004. *Fraud Examination and Prevention*. Australia: Thomson, South-Western.
- American Institute of Certified Public Accountant dan Association of Certified Fraud Examiners. 2009. *Managing The Business Risk of Fraud: A Practical Guide*.
- Association of Certified Fraud Examiners. www.acfe.com diakses 5 Desember 2011
- Arens, A. dan Loebbecke. 1996. *Auditing: Suatu Pengantar*. Salemba Empat
- Arnold, D. dan L. Ponemon. 1991. *Internal auditors' perceptions of whistle-blowing and the influence of moral reasoning: an experiment*. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* Vol. 10.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. www.bpk.go.id diakses pada 4 Februari 2012
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. www.bpkp.go.id diakses pada November 2011
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Abstraksi Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008*.
- Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id diakses pada 10 Januari 2012
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bernardi, R. dan S. Guptill. 2008. *Social Desirability Response Bias, Gender and Factors Influencing Organizational Commitment: An International Study*. *Journal of Business Ethics*.
- Betts, D. 2009. *The Psychology of Fraud: What Makes Employee Cross The Line?*. Joint ACFE/ISACA.
- Boynton, W. C. dan R.N. Johnson. *Modern Auditing Eight Edition*. John Wiley and Son. Inc
- Coram, P. Ferguson, C. dan Moroney, R. 2008. *Internal audit, alternative internal audit tructures and the level of misappropriation of assets fraud*. *Accounting and Finance* vol. 48

- Dorminey, J., A. S. Fleming., M.J. Kranacher, dan R. A. Riley. 2011. *Beyond The Fraud Triangle. Enhancing Deterrence of Economic Crimes*. CPA Journal.
- Hair, J. F. 2006. *Multivariate Data Analysis*. Prentice Hall.
- Hernandez, J. R. dan T. Groot. 2007. *Corporate Fraud: Preventive Controls Which Lower Corporate Fraud*. Amsterdam Research Centre in Accounting.
- Hogan, C. E., Z. Rezaee., R. A. Riley., dan U. K. Velury. 2008. *Financial Statement Fraud: Insights From The Academic Literature*. Auditing: A Journal of Practice and Theory vol 27.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. SA Seksi 316. Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan*.
- _____. 2001. *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. SA Seksi 319. Perimbangan Atas Pengendalian Internal Dalam Audit Laporan Keuangan*.
- Indonesian Corruption Watch. www.antikorupsi.org diakses pada November 2011
- Liyanarachi, G dan C. Newdick. 2009. *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence*. Journal of Business Ethics 89.
- Lovell, A. 1997. *Some Thoughts on Kohlberg's Hierarchy of Moral Reasoning and Its Relevance for Accounting Theories Of Control*. Accounting Education 6
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Menuju Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan vol.2
- Maroney, J. J. dan R. E. McDevitt. 2008. *The Effects of Moral Reasoning on Financial Reporting Decisions in a Post Sarbanes-Oxley Environment*. Behavioral Research of Accounting
- Mc Phail, K. dan D. Walters. 2009. *Accounting and Business Ethics*. Routledge: London dan New York.
- Mulyadi. 1998. *Auditing Buku Satu*. Salemba Empat
- Ramamoorti, S. 2008. *The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula*. Issues in Accounting Education vol. 23.
- Rest, J. R. 2000. *A Neo-Kohlbergian Approach To Morality Research*. Journal of Moral education vol 29.
- Syakhroza, A. 2003. *Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance*. Jurnal Manajemen dan Usahawan Vol. 32

- Transparency International. www.transparency.org diakses pada Januari 2012
- Wells, J. T. 2007. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection: Second Edition*. John Wiley and Sons Inc.
- Welton, R. E., J. R Davis dan M. LaGroune. 1994. *Promoting The Moral Development Of Accounting Graduate Students*. Accounting Education. International Journal 3.
- Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia vol.9.
- Xu, Yin dan D.E. Ziegenfuss. 2008. *Reward Systems, Moral Reasoning, and Internal Auditors' Whistle-Blowing Wrongdoing Behavior*. Journal of Business and Psychology.

LAMPIRAN

Level Penalaran Moral	Elemen Pengendalian internal	
	Ada	Tidak ada
Tinggi	Grup 1	Grup 2
Rendah	Grup 3	Grup 4

Tabel 1. Desain Eksperimen 2x2

Source	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected model	3	15.798	22.338	0,000	0,558
Intercept	1	264.221	373.603	0,000	0,876
Moralitas	1	22.078	31.217	0,000	0,371
Elemen PI	1	9.105	12.874	0,001	0,195
Moralitas*ElemenPI	1	16.179	22.877	0,000	0,301
Error	53				
Adj.RSquared=0,533					

Tabel 2 Pengaruh Level Moral dan Elemen Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Level Penalaran Moral	Elemen Pengendalian internal	
	Ada	Tidak ada
Tinggi	<p>Grup 1</p> <p>Mean=1,6667</p> <p>S.D. (0,81650)</p> <p>n=15</p>	<p>Grup 2</p> <p>Mean=1,4000</p> <p>S.D. (0,50709)</p> <p>n=15</p>
Rendah	<p>Grup 3</p> <p>Mean= 1,8462</p> <p>S.D. (0,89872)</p> <p>n=13</p>	<p>Grup 4</p> <p>Mean=3,7143</p> <p>S.D. (0,89258)</p> <p>n=14</p>

Tabel 3 Deskripsi Statistik Grup

	<i>Mean Difference (I-J)</i>	<i>Standard Error</i>	<i>P-Value</i>
Grup 1 dan 2	0,2667	0,30708	0,821
Grup 4 dan 2	2,3143*	0,31251	0,000
Grup 4 dan 3	1,8681*	0,32391	0,000

Tabel 4 Tukey *t*-statistics

Skenario Perlakuan Terhadap Elemen Pengendalian Internal

Latar Belakang

Rudi adalah seorang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Y. Rudi mengepalai Dinas X. Sebagai kepala dinas, ia diberi kuasa oleh kepala daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, termasuk mengkoordinir dan bertanggungjawab atas proses pengadaan barang di lingkup dinas. Beberapa tugas Rudi lainnya adalah menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Dinas X menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku. Tindakan disiplin sangat dikedepankan atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku tersebut. Di Dinas X, setiap terjadi transaksi akan selalu dicatat tepat waktu. Otorisasi transaksi dan bukti pendukung selalu diperhatikan dengan cermat. Pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi, seperti aset instansi, dilakukan secara berkala. Tidak ada pegawai yang merangkap beberapa tugas sekaligus di instansi ini. Sistem akuntansi yang ada di instansi dapat mencatat seluruh informasi kegiatan operasional di dalam instansi sehingga tidak ada satupun kegiatan operasional yang luput dari pencatatan. Pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai derajat keamanan aset selalu dilakukan secara periodik.

Setiap satu tahun sekali, auditor internal pemerintah akan melakukan audit di instansi Rudi untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa temuan dari proses audit tersebut kemudian akan menjadi rekomendasi bagi instansi Rudi. Rekomendasi tersebut berisi saran-saran untuk perbaikan operasional dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas.

Program Kerja

Salah satu program kerja instansi Rudi tahun ini adalah pengadaan alat-alat kesehatan bagi puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Y. Proyek tersebut bernilai Rp.750.000.000. Dinas X mengadakan proses tender untuk mendapatkan pemasok alat-alat kesehatan tersebut. Dibentuk sebuah panitia tender untuk menangani tender tersebut. Dalam tender yang berlangsung, terdapat 4 perusahaan peserta tender. Salah satu perusahaan tersebut adalah

milik teman lama Rudi, Dani. Sebelum proses tender dimulai, Dani menemui Rudi dan memintanya untuk membantu memenangkan tender untuk perusahaannya. Jika perusahaannya yang menang, maka ia akan memberikan 20% (atau senilai Rp150.000.000) dari nilai nominal proyek tersebut untuk pihak-pihak yang membantu kemenangannya, termasuk panitia tender dan Rudi.

Rudi dihadapkan pada dua pilihan: memenangkan tender untuk perusahaan Dani atau meneruskan prosedur tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika Rudi memilih alternatif pertama, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Rudi, diantaranya: memerintahkan panitia tender untuk memenangkan perusahaan Dani, menyetujui nominal tender (Dinas X tetap membayar 100%, 20% dari pembayaran akan diberikan Dani kepada Rudi dan panitia tender) dan melakukan otorisasi pembayaran kerjasama Dinas X dan perusahaan Dani. Jika Rudi memilih alternatif yang kedua, maka proses tender seluruhnya menjadi wewenang panitia tender. Panitia tender bertanggungjawab untuk mengadakan mekanisme tender sesuai dengan ketentuan yang ada dan tanpa intervensi dari Rudi.

Setelah membaca latar belakang dan program kerja diatas, berikan jawaban anda pada pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda 'X':

Apakah Rudi sebaiknya menerima tawaran Dani?

Sangat tidak setuju

Netral

Sangat Setuju

1

2

3

4

5

6

7

Skenario Perlakuan Tidak Terdapat Elemen Pengendalian Internal

Latar Belakang

Rudi adalah seorang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Y. Rudi mengepalai Dinas X. Sebagai kepala dinas, ia diberi kuasa oleh kepala daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, termasuk mengkodinir dan bertanggungjawab atas proses pengadaan barang di lingkup dinas. Beberapa tugas Rudi lainnya adalah menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Di Dinas X, terdapat aturan-aturan mengenai perilaku. Aturan-aturan tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Beberapa pegawai ada yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perilaku, namun sanksi yang tegas tidak diberlakukan. Di Dinas X, setiap terjadi transaksi tidak selalu dapat dicatat tepat waktu. Tanggal transaksi dan tanggal pencatatan seringkali tidak sesuai. Terkadang otorisasi transaksi dan bukti pendukung tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi, seperti aset instansi, hanya dilakukan sesekali. Di instansi ini, beberapa pegawai ada yang merangkap beberapa tugas sekaligus karena keterbatasan sumber daya manusia. Sistem akuntansi yang ada di instansi belum dapat mencatat seluruh informasi kegiatan operasional di dalam instansi sehingga banyak kegiatan operasional yang luput dari pencatatan. Pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai derajat keamanan aset tidak selalu dilakukan.

Program Kerja

Salah satu program kerja instansi Rudi tahun ini adalah pengadaan alat-alat kesehatan bagi puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Y. Proyek tersebut bernilai Rp.750.000.000. Dinas X mengadakan proses tender untuk mendapatkan pemasok alat-alat kesehatan tersebut. Dibentuk sebuah panitia tender untuk menangani tender tersebut. Dalam tender yang berlangsung, terdapat 4 perusahaan peserta tender. Salah satu perusahaan tersebut adalah milik teman lama Rudi, Dani. Sebelum proses tender dimulai, Dani menemui Rudi dan memintanya untuk membantu memenangkan tender untuk perusahaannya. Jika perusahaannya yang menang, maka ia akan memberikan 20% (atau senilai Rp150.000.000) dari nilai

nominal proyek tersebut untuk pihak-pihak yang membantu kemenangannya, termasuk panitia tender dan Rudi.

Rudi dihadapkan pada dua keputusan: memenangkan tender untuk perusahaan Dani atau meneruskan prosedur tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika Rudi memilih alternatif pertama, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Rudi, diantaranya: memerintahkan panitia tender untuk memenangkan perusahaan Dani, menyetujui nominal tender (Dinas X tetap membayar 100%, 20% dari pembayaran akan diberikan Dani kepada Rudi dan panitia tender) dan melakukan otorisasi pembayaran kerjasama Dinas X dan perusahaan Dani. Jika Rudi memilih alternatif yang kedua, maka proses tender seluruhnya menjadi wewenang panitia tender. Panitia tender bertanggungjawab untuk mengadakan mekanisme tender sesuai dengan ketentuan yang ada dan tanpa intervensi dari Rudi.

Setelah membaca latar belakang dan program kerja diatas, berikan jawaban anda pada pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda 'X':

Apakah Rudi sebaiknya menerima tawaran Dani?

Sangat tidak setuju

Netral

Sangat Setuju

1

2

3

4

5

6

7